

OPINI

Refleksi 70 Tahun Konstitusi Kita



Hendra Kurniawan MPd

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

MASYARAKAT pasti mafhum bahwa tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan negara ini. Akan tetapi sangat jarang masyarakat

yang tahu bahwa sehari setelahnya, yaitu tanggal 18 Agustus, diperingati sebagai Hari Lahirnya Konstitusi. Tahun ini bersamaan dengan peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka, maka genaplah pula 70 tahun usia konstitusi kita yang dikenal sebagai UUD 1945.

UUD 1945 disahkan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Saat itulah unsur pokok berdirinya sebuah negara tergenapi. Syarat konstitutif yang harus dipenuhi bagi pembentukan

■ Bersambung ke Hal 11

Refleksi 70

Sambungan Hal. 1

negara selain adanya rakyat dan wilayah ialah pemerintahan yang berdaulat. Pada tanggal yang sama, pemerintahan baru juga dibentuk dengan menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemerintahan baru ini menjalankan roda pemerintahan atas dasar konstitusi negara yaitu UUD 1945.

Inilah ciri khas negara demokrasi yaitu pemerintahan berjalan di atas rel konstitusi. Di dalamnya berisi aturan-aturan dasar yang dijadikan pedoman pemerintah yang berkuasa agar tak menyimpang dari kehendak rakyat. Jika tanpa konstitusi maka pemerintah bisa berubah menjadi otoriter. Konstitusi merupakan cerminan aspirasi dan harapan seluruh lapisan masyarakat berbagai kelompok dan golongan.

Untuk itu guna menampung sekaligus memadupadankan harapan rakyat disusunlah

sebuah konsensus bersama yang diwujudkan dalam sebuah UUD. Para pendiri negara ini sejak awal telah ber-wiweka bahwa UUD 1945 merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat. Meskipun harus diakui UUD 1945 disusun serba darurat karena pertama-tama demi terpenuhinya kelengkapan berdirinya sebuah negara. Kenyataannya sampai sekarang UUD 1945 tetap relevan sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

Jika akibat reformasi sempat terjadi empat kali amandemen terhadap UUD 1945, namun tak sampai mereduksi jiwa dan semangat UUD 1945. Dinamika perjalanan sejarah konstitusi kita ini menunjukkan betapa ampuhnya rumusan *the founding father* republik ini sehingga mampu mawadahi kepentingan dan keanekaragaman rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Bahkan demi mencegah penyelewengan

konstitusi dalam praktik kenegaraan, didirikan Mahkamah Konstitusi yang sangat krusial dalam mengawal pelaksanaan UUD 1945.

Konstitusi merupakan aturan bersama dalam hidup bernegara yang harus ditaati. Menjadi sangat absurd apabila kini ada kelompok masyarakat yang mengatasnamakan kehendak rakyat namun mencoba menggerogoti salah satu pilar bangunan bernegara yaitu UUD 1945.

Memperingati 70 tahun konstitusi kita menjadi kesempatan yang baik untuk berefleksi. Sudahkah setiap kebijakan pemerintah mengacu tujuan menegajawantahkan maksud UUD 1945? Konstitusi bukan sekadar deretan pasal dan ayat, namun jauh lebih penting yakni menemukan kepentingan, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat pemilik sah negeri merdeka ini. Dirgahayu Indonesia, tegaklah konstitusi kita! (*)